



## **Advokasi dalam Diplomasi Publik Indonesia mengenai Perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina 2022**

Nayottama Syauqilhaq Nurdin

Universitas Padjadjaran, Indonesia; nayottama19001@mail.unpad.ac.id

Chandra Purnama

Universitas Padjadjaran, Indonesia; chandra.purnama@unpad.ac.id

Kiagus Zaenal Mubarok

Universitas Padjadjaran, Indonesia; kiagus.zaenal@unpad.ac.id

| Submit: 22-01-2024

| Direvisi: 20-05-2024

| Publish: 13-08-2024

### **Keywords**

Advocacy in  
Public  
Diplomacy,  
Indonesian Peace  
Values,  
Indonesian  
Public  
Diplomacy,  
Russia-Ukraine  
Conflict 2022.

### **ABSTRACT**

*The escalation of Russia-Ukraine conflict in 2022 had significant repercussions for numerous states, including Indonesia. As a nation that upholds peace and maintains friendly ties with both parties, the role of peace facilitator posed as a challenge for Indonesia's diplomacy. This research aimed to analyze Cull's concept of advocacy in public diplomacy (2009), that discuss Indonesia's peace values in the conflict. A qualitative study of methods, informational aspects, and elements of advocacy was conducted based on the official public information archives of the Indonesian government. Interviews were also carried out with representatives from Ministry of Foreign Affairs.*

*Research findings revealed the existence of advocacy in Indonesia's public diplomacy regarding peace, in social media activities, publication of press releases, and strategic dissemination of statements through Indonesian diplomatic networks. The informational aspects of Indonesia's advocacy indicated a clear goal setting, careful audience selection, and choices of credible messengers. Characteristics of advocacy in Indonesia's public diplomacy were found to have a short conceptual time frame, an outward information flow, utilization of government infrastructure, and the credibility of advocacy information based on its proximity to government bodies.*

### **Kata Kunci**

Advokasi dalam  
Diplomasi  
Publik,  
Diplomasi Publik  
Indonesia,  
Konflik Rusia-  
Ukraina, Nilai  
Perdamaian  
Indonesia.

### **ABSTRAK**

Konflik Rusia-Ukraina yang mengalami eskalasi di tahun 2022 memberi dampak bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan merupakan negara sahabat kedua pihak, kontribusi sebagai fasilitator perdamaian menciptakan tantangan bagi diplomasi negara. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsep advokasi dalam diplomasi publik milik Cull (2009) mengenai nilai perdamaian Indonesia pada konteks konflik yang terjadi. Kajian kualitatif terhadap metode, aspek informasi, dan elemen advokasi dilakukan terhadap arsip resmi informasi publik Pemerintah RI. Wawancara juga dilakukan terhadap perwakilan Kementerian Luar Negeri RI.

Hasil penelitian menunjukkan keberadaan advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian dalam bentuk aktivitas media sosial, penyampaian dan publikasi pers, serta penyampaian pernyataan strategis melalui jejaring dan forum diplomatik Indonesia. Aspek informasi advokasi Indonesia kemudian menunjukkan adanya penentuan tujuan yang jelas, pemilihan *audiens* yang hati-hati, dan pemilihan penyampai pesan yang kredibel. Karakteristik advokasi dalam diplomasi publik Indonesia juga ditemukan memiliki jangka waktu konseptual yang singkat, memiliki laju informasi dengan arah dari dalam ke luar, dilakukan menggunakan infrastruktur pemerintahan, dan keterpercayaan informasi advokasi yang ditunjukkan melalui kedekatan penyampaiannya dengan badan Pemerintah.

## PENDAHULUAN

Eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang terjadi pasca invasi Rusia pada 24 Februari 2022 merupakan peristiwa besar yang memanggil komunitas internasional untuk membantu proses perdamaian. Upaya demi upaya untuk mendorong terciptanya resolusi tanpa aksi kekerasan, membantu korban yang mengalami kerugian, serta menjaga negara lain dari dampak perang, telah digencarkan terus menerus walau belum menemukan titik akhir hingga penghujung tahun 2022. Di antara berbagai alasan yang menyebabkan sulitnya tercapai kesepakatan adalah mengakarnya sebab mula perang pada “trauma” geopolitik yang melibatkan sejarah hubungan kedua negara disertai kompleksitas kepentingan yang jauh berlawanan (Abualkanam, 2023; Lamb, James dan Komesaroff, 2023; Henrikson, 2022; Kuzio, 2022; Mankoff, 2022).

United Nations (2022) mencatat eskalasi perang telah secara nyata menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa, mendorong aktivitas pengungsi secara masif, menyebabkan kerusakan infrastruktur esensial di wilayah perang, serta krisis pangan dan energi di seluruh dunia. Walaupun secara geografis Indonesia memiliki letak yang jauh dari pusat konflik, dampak global yang diciptakan tetap berpengaruh bagi negara, setidaknya melalui guncangan ekonomi yang diciptakan pada krisis keuangan, energi dan pangan. Sanksi dan blokade ekonomi yang saling bermunculan akibat perang tersebut menjadi penyebab lambatnya ekonomi global pada tahun 2022 (Bank Indonesia, 2022). Pada situasi ekonomi Indonesia yang masih rentan akibat krisis ekonomi pandemi Covid-19, terciptanya inflasi global juga menurunkan nilai mata uang rupiah selama tahun 2022 dan menyebabkan gangguan bagi perputaran uang negara (BPS, 2022).

Berlanjut pada aspek energi, peningkatan harga minyak mentah Indonesia terjadi (*Indonesian Crude Price*) mencapai angka US\$95 per barel. Hal tersebut mendorong peningkatan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah hingga 520 miliar rupiah dari yang sebelumnya hanya 170 miliar rupiah (Handayani & Purba, 2022). Lebih dari itu, dampak signifikan juga dirasakan pada aspek pangan dimana terjadi peningkatan harga impor gandum dan biji-bijian akibat didominasinya gandum Indonesia oleh produk Ukraina, hingga memenuhi lebih dari 20% dari total impor biji-bijian Indonesia (Hutabarat, 2022; Junaedi, 2022).

Di atas dampak yang dirasakan dan bagaimana urgensi untuk berkontribusi hadir sebagai “reaksi” akan kerugian nasional, harapan untuk terus mempertahankan stabilitas global dan menjaga perdamaian telah lama menjadi prinsip fundamental bagi politik luar negeri Indonesia. Sorotan kepemimpinan yang dimiliki negara Indonesia sebagai presiden *Group of 20* di tahun 2022 bersamaan dengan keanggotaannya dalam berbagai organisasi internasional juga memberikan kesempatan untuk melakukan penyuaraan nilai dan kebijakan Indonesia. (Kementerian Luar Negeri RI, 2023a & Arjanto, 2022).

Dengan memanfaatkan strategi advokasi dalam diplomasinya, Indonesia berpotensi untuk memperkuat suara dan pengaruhnya di forum internasional demi mendesak dilakukannya dialog damai atas dasar integritas wilayah, penghormatan terhadap kedaulatan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Terlebih dengan status sebagai negara Non-Blok dan sahabat dari kedua pihak (Rusia dan Ukraina) penunjukkan citra Indonesia sebagai fasilitator perdamaian yang netral akan berpengaruh terhadap kepercayaan komunitas internasional. Berbagai peluang tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu mempermudah tercapainya kepentingan nasional dan mempererat dukungan diplomasi pada berbagai konflik lainnya (Cull, 2009; Melissen, 2005).

Aktivitas advokasi telah menjadi bagian dari pendekatan diplomasi publik yang diakukan melalui berbagai literatur terdahulu. Sebagaimana diulas oleh Melissen (2005) dan Cull (2009), metode diplomasi tersebut telah digunakan oleh Kanada dan Amerika sebagai cara negara tersebut berkontribusi pada agenda konflik internasional. Kedua negara tersebut secara praktis melakukan pendekatan publik (khususnya kepada perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah)

untuk mempromosikan gagasan politiknya dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di level global (Cull, 2009; Melissen, 2005).

Metode tersebut juga ditemukan dalam aktivitas diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian melalui beragam capaian terdahulu. Pada penelitian Mudore (2019), Suratiningsih (2020), MD, et al (2020), Sundari, et al (2021), dan Sari, et al (2018), ditunjukkan aktivitas advokasi yang dilakukan Indonesia terhadap agenda konflik spesifik (di antaranya pada konflik Israel-Palestina, Afghanistan, dan Myanmar) (Sundari et al, 2021; MD et al, 2020; Suratiningsih, 2020; Mudore, 2019; Sari et al, 2018).

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Salmaagista, (2022), Agustini et al, (2021), Wibowo et al (2021), Wardhany & Nila (2021) Tiffany & Azmi (2020), Khatrunada & Alam (2019), Agung (2018), Lusiana et al (2020), dan Darmosumarto (2013) menemukan aktivitas advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian, yang dilakukan tanpa secara langsung digunakan untuk merespon konflik yang sedang terjadi, melainkan dalam bentuk kegiatan internasional seperti *Asian Games 2018, International Gamelan Festival 2018, MotoGP Mandalika 2022, Bali Democracy Forum 2008-2020, dan Bali Democracy Student Conference 2020* (Salmaagista, 2022; Agustini et al, 2021; Wibowo et al, 2021; Wardhany & Nila, 2021; Tiffany & Azmi, 2020; Khatrunada & Alam, 2019; Agung, 2018; Lusiana et al, 2020; dan Darmosumarto, 2013).

Adapun artikel ini bertujuan untuk menganalisis advokasi nilai perdamaian Indonesia berdasarkan metode, aspek-aspek informasi, dan elemen advokasi yang diutarakan oleh Cull (2009). Kebaruan tantangan akibat munculnya konflik Rusia-Ukraina menjadi tinjauan utama bagi relevansi, sekaligus penunjang pertanyaan penelitian ini, yakni “Bagaimana advokasi dalam diplomasi publik menjadi cara untuk menyampaikan nilai perdamaian dan merespon konflik tersebut?” Artikel ini penting untuk memberikan wawasan mendalam bagi pembaca mengenai salah satu perspektif dari aksi perdamaian Indonesia. Artikel ini juga bertujuan menjadi landasan bagi penelitian berikutnya dan menjadi sumber informasi bagi para pengambil kebijakan terkait potensi aset diplomatik Indonesia untuk memberikan pengaruh sebagai mediator dan pembawa perdamaian di panggung global.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Advokasi dalam Diplomasi Publik**

Advokasi dalam diplomasi publik merupakan satu di antara lima tipologi metode diplomasi publik yang diutarakan oleh Cull (2009). Hal yang membedakan advokasi dari metode diplomasi publik yang lain adalah bentuk aktivitasnya yang terfokus pada segala usaha komunikasi negara untuk menyampaikan ‘gagasan, ide, dan kepentingan umumnya untuk menciptakan pemahaman bagi subjek tujuannya (publik asing)’ (Cull, 2022; Cull, 2012; Gregory, 2011; Cull, 2009). Selain melalui konsep yang diutarakan oleh Cull (2009), aktivitas advokasi juga telah ditunjukkan sebagai pilar pertama dari tujuh pilar diplomasi publik Ross (2003). Ross (2003) mengutarakan bahwa advokasi dalam diplomasi publik penting bagi negara untuk membangun pemahaman masyarakat asing akan suatu kebijakan negara secara langsung dan sedarinya, bukan atas apa yang “orang lain” katakan (Cull, 2009; Ross, 2003).

Dalam proses penyampaiannya, pesan advokasi menyentuh publik tujuannya melalui berbagai kanal diplomasi – seperti jejaring politik dan media – yang mampu diakses publik asing. Advokasi pun dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya *embassy press relations* atau hubungan pers kedutaan (yang cenderung digunakan untuk mempromosikan kebijakan secara tegas dan tertuju) serta *informational works* atau pengelolaan informasi (yang cenderung digunakan untuk mempromosikan kebijakan secara bervariasi dari yang lebih ringan dan netral hingga tegas dan kuat). Dalam menjelaskan efektifitas advokasi dalam diplomasi publik, Cull (2009) menegaskan pentingnya suatu negara menajamkan tiga aspek dalam ramuan informasi yang ingin dikomunikasikan dalam kampanye suatu negara. Tiga aspek tersebut adalah (Cull, 2009):

- 1) adanya tujuan yang jelas,
- 2) pemilihan *audiens* yang hati-hati,
- 3) serta pemilihan penyampai pesan atau *messenger* yang terpercaya.

Dalam menjelaskan karakteristik dari advokasi dalam diplomasi publik, Cull (2009) menjelaskan empat sifat advokasi dalam diplomasi publik, yakni memiliki jangka waktu konseptual yang singkat, memiliki laju informasi dari dalam ke luar, dilakukan melalui infrastruktur pemerintahan, dan memiliki kredibilitas advokasi yang ditunjukkan berdasarkan kedekatannya dengan badan pemerintahan. Cull menekankan bahwa hubungan antar elemen diplomasi publik bersifat penting untuk memaksimalkan pengaruh yang diharapkan (Cull, 2009). Tidak hanya untuk mempromosikan kebijakan politik, advokasi dalam diplomasi publik dapat juga digunakan untuk menyampaikan kepentingan nasional lain seperti ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. (Snow dan Cull, 2020; Pamment, 2013; Kelley, 2008 dalam Pamment, 2013; Smith, 1989 dalam Waller, 2007).

## **METODE RISET**

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif milik Huddleston, et al (2022) dan Yin (2015) untuk mengkaji metode, konstruksi informasi, dan elemen advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina 2022. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, wawancara, dan observasi terhadap beragam sumber (Huddleston et al, 2022; Yin, 2016).

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip informasi publik badan resmi pelaksana politik luar negeri Indonesia di tahun 2022, yang terdiri dari arsip informasi publik Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Adapun arsip informasi yang dimaksud merupakan kumpulan dokumen visual dan audiovisual yang diperoleh dari *website*, *YouTube*, dan media sosial (*Instagram* dan *Facebook*) sebagai media komunikasi Pemerintah.

Wawancara kemudian telah dilakukan kepada dua narasumber dari Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik Indonesia untuk memperdalam tinjauan tersebut. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2022 Kementerian Luar Negeri, Laporan Capaian Kinerja Presiden RI 2022, Laporan Kinerja Tahun 2022 KBRI Moskow dan Kyiv, serta berbagai arsip resmi lainnya juga telah digunakan dalam proses analisis sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan data untuk menunjang validitas dan reliabilitas penelitian, melalui tiga teknik pengumpulan data dan minimal tiga sumber data penelitian. Pemaparan hasil dan pembahasan akan dimulai dengan penjelasan objek penelitian, yakni Advokasi dalam Diplomasi Publik Indonesia pasca reformasi hingga saat ini. Setelahnya, hasil analisis terhadap metode, aspek-aspek informasi, dan elemen advokasi akan dijelaskan sesuai dengan temuan data pada konteks konflik Rusia-Ukraina tahun 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Advokasi dalam Diplomasi Publik Indonesia**

Secara harfiah, metode advokasi dalam diplomasi publik Indonesia paling relevan dihubungkan dengan berbagai aktivitas komunikasi internasional untuk mempromosikan nilai dan gagasan kebijakan negara kepada publik asing. Adanya perbedaan idealisme politik, prioritas kebijakan luar negeri, dan media komunikasi, menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perubahan advokasi Indonesia dari waktu ke waktu (Djalal, 2022; Sen & Hill, 2007). Sejak masa pasca reformasi tahun 1998 hingga saat ini, idealisme politik Indonesia mengedepankan usaha demokrasi dalam proses pembuatan kebijakan. Perumusan Kebijakan Luar Negeri kemudian dilakukan oleh Badan Eksekutif Negara dan Kementerian Luar Negeri yang telah mempertimbangkan suara publik melalui media dan organisasi kemasyarakatan. Berbeda dengan masa pemerintahan terdahulu, Diplomasi Publik Indonesia sejak tahun 2002 telah menjadi instrumen khusus yang dipertimbangkan dalam

Kementerian Luar Negeri bersamaan dengan pembangunan direktorat tersendiri di dalam lembaga kementerian tersebut (Hujgh, 2016 & Mukrimin, 2013).

Berkaitan dengan perkembangan idealisme politik luar negeri Indonesia, masa kepemimpinan Presiden Indonesia Ke-3 BJ Habibie, Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid, dan Presiden Indonesia ke-5 Megawati memiliki kesamaan sifat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, namun dengan fokus pemerintahannya yang terletak pada penciptaan resiliensi struktural negara dan perbaikan kebijakan domestik. Prioritas pada kebijakan domestik secara tidak langsung mengurangi keaktifan diplomasi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Ditambah dengan masa pemerintahan ketiganya yang terbilang singkat, peluang berpartisipasi dalam arena global menjadi terbatas. Walaupun demikian, pemerintahan berikutnya di era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meningkatkan kembali keaktifan diplomasi Indonesia dengan memperhatikan advokasinya pada nilai politik luar negeri Indonesia yang demokratis dan menghormati HAM (Wuryandari, 2022; Widiatmaja & Albab, 2019).

Melaju dengan prioritas yang serupa, kepemimpinan Presiden berikutnya, Joko Widodo, juga menunjukkan keaktifan dalam melakukan aktivitas advokasi dalam diplomasi publik dengan mengedepankan nilai politik luar negeri Indonesia yang multilateralis, berupaya menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia, dan memperhatikan keterikatan (*linkages*) antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri (Wuryandari, 2022; Widiatmaja & Albab, 2019).

Berkat desentralisasi kebijakan yang berjalan bersamaan dengan demokratisasi politik Indonesia pasca reformasi, penanganan advokasi dalam diplomasi publik Indonesia kini dilakukan oleh pelaku utama kebijakan luar negeri Indonesia yang diatur dalam Undang Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pemerintah Indonesia yang secara resmi berwenang, dalam hal ini Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Perwakilan Negara Indonesia di Luar Negeri, merupakan agen strategis kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk di antaranya berfungsi untuk mengatur komunikasi nilai dan gagasan kebijakan resmi Indonesia kepada masyarakat, termasuk masyarakat asing (Kementerian Luar Negeri RI, 2023a; Kementerian Luar Negeri RI, 2023b).

Berbeda dengan era sebelum reformasi yang masih mengandalkan non-pemerintah sebagai wadah diseminasi advokasi Indonesia ke luar negeri, kemajuan teknologi dan pemanfaatan internet mendorong pengembangan *e-government* di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi *wide area network, computing*, dan internet dengan sistem informasi dan manajemen informasi pemerintahan (Amrozhi et al, 2022). Integrasi teknologi dengan metode advokasi dalam diplomasi publik Indonesia dapat dilihat dari berbagai misi baru yang dikembangkan oleh tiap pelaku advokasi. Kementerian Luar Negeri di antaranya telah memanfaatkan wadah situs *web* ‘*kemlu.go.id*’ sebagai sumber arsip informasi publiknya, bersama dengan media sosial *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook*, pasca penerbitan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI (Azmi, 2023). Hal yang sama dilakukan oleh Presiden yang pada saat ini memiliki media sosial, serta menggunakan situs *web* ‘*Presidenri.go.id*’ sebagai sumber arsip informasi publiknya. Sejak tahun 2011, Kementerian Luar Negeri juga menggunakan Tabloid Diplomasi yang mampu diakses secara daring dan dipublikasi secara cetak untuk membagikan informasi resmi terkini mengenai kabar diplomasi RI (Wuryandari, 2022; Laras, 2021; Huijgh, 2016).

**Tabel 1. Advokasi dalam Diplomasi Publik Pasca Reformasi**

<b>Masa Pasca Reformasi</b>	
<b>Aktivitas Advokasi dalam Diplomasi Publik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang berwenang pada politik luar negeri sesuai dengan Undang-Undang.</li></ul>

<b>Metode Advokasi dalam Diplomasi Publik Indonesia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komunikasi melalui forum diplomatik</li><li>• Penyiaran internasional melalui media fisik (media berita cetak) dan digital (<i>website</i> dan media sosial) resmi pemerintahan</li></ul>
---	---

Sumber: Penulis, 2023

### **Analisis Metode Advokasi dalam Diplomasi Publik Indonesia mengenai Perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina 2022**

Kajian terhadap arsip informasi publik badan resmi pelaksana politik luar negeri Indonesia telah mendapatkan berbagai temuan mengenai aktivitas advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022. Pada metode pengelolaan informasi (*informational works*), ditemukan adanya dua aktivitas, yakni publikasi media serta penyampaian pernyataan strategis secara langsung oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia. Melalui publikasi media, media sosial *Facebook* dan *Instagram* digunakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kedutaan Besar RI di Kyiv, dan Kedutaan Besar RI di Moskow untuk mengadvokasikan nilai dan gagasan perdamaian Indonesia. Selain itu, penyampaian pernyataan strategis yang ditunjukkan melalui berbagai arsip pertemuan internasional juga menjadi bentuk advokasi pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah RI.

Melalui metode kedua, yakni *embassy press relations*, ditemukan adanya aktivitas penyampaian dan publikasi pers resmi oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri RI dalam bentuk Keterangan Pers, serta oleh Badan Resmi Pemerintahan (Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri RI, serta Kedutaan Besar RI di Moskow dan Kyiv) dalam bentuk Artikel dan Siaran Pers. Penyampaian dilakukan secara daring dan luring melalui pertemuan langsung, dan arsip pertemuan disimpan dalam *YouTube* dan situs *web* resmi Kementerian Luar Negeri RI, dan Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI.

**Tabel 2. Metode Advokasi dalam Diplomasi Publik Indonesia**

Metode Advokasi	Aktivitas Advokasi	Sumber
<b>Pengelolaan Informasi (<i>informational works</i>)</b>	Publikasi media resmi Pemerintah RI.	Media sosial <i>Facebook</i> dan <i>Instagram</i> resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kedutaan Besar RI di Kyiv, dan Kedutaan Besar RI di Moskow.
	Penyampaian pernyataan strategis oleh Pemerintah RI.	Arsip berita dan pers pertemuan resmi pemerintahan.
<b>Hubungan Pers Kedutaan (<i>embassy press relations</i>)</b>	Publikasi artikel dan penyampaian pers langsung oleh badan pemerintahan (Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kementerian Luar Negeri RI) atau penyampaian keterangan pers	<i>YouTube</i> dan situs <i>web</i> resmi Kementerian Luar Negeri RI, dan Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI.

	langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri.	
--	--	--

Sumber: Penulis, 2023

### **Analisis Aspek Informasi Advokasi dalam Diplomasi Publik Indonesia mengenai Perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina 2022**

Berdasarkan berbagai temuan aktivitas tersebut, analisis informasi advokasi dilakukan melalui tiga aspek, yakni Penciptaan Tujuan, Pemilihan *Audiens*, dan Pemilihan Penyampai Pesan.

#### **a. Aspek Penciptaan Tujuan Advokasi**

Pada aspek pertama, temuan terhadap tiap aktivitas advokasi dalam diplomasi publik Indonesia menunjukkan adanya lima tema informasi utama yang menjadi tujuan sekaligus tombak kampanye nilai dan gagasan kebijakan untuk perdamaian Rusia dan Ukraina di tahun 2022. Kelima nilai tersebut menunjukkan kejelasan konstruksi tujuan informasi dalam advokasi diplomasi publik Indonesia. Tiap tema informasi tersebut kemudian memiliki cerminan terhadap nilai perdamaian yang diketahui bukan hanya mengenai nilai perdamaian dunia, namun nilai perdamaian yang menganut idealisme khas Indonesia.

Pada tema informasi pertama, aktivitas advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengutamakan pemberian *penegasan akan nilai, posisi dan kontribusi Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina*. Dasar informasi dari publikasi dan pernyataan strategis yang disampaikan Indonesia kepada publik asing menjelaskan bagaimana Indonesia tanpa terkecuali menghargai kemerdekaan dan kedaulatan tiap bangsa. Dengan merefleksikan nilai perdamaian dunia, Indonesia kemudian berdiri dan menghormati tujuan dan prinsip Piagam PBB serta Hukum Internasional, dalam hal integritas wilayah dan hak kedaulatan.

Nilai perdamaian yang identik dengan ciri khas Indonesia digunakan untuk mendukung aspek perdamaian dunia yang diadvokasikan. Beberapa cerminan terhadap Dasar Negara Republik Indonesia di antaranya ditunjukkan dengan pernyataan posisi Indonesia yang menyuarakan pendukungan anti-penjajahan, dan pemenuhan hak kebangsaan serta kedaulatan. Dengan mengedepankan aspek kontribusi bantuan kemanusiaan, Indonesia bukan hanya mencerminkan pembela keadilan dan hak kemanusiaan dunia, namun juga menunjukkan prinsipnya yang tidak memihak kekerasan dengan tidak menjadi pengirim persenjataan militer.

Informasi mengenai penegasan nilai, posisi, dan kontribusi Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai publikasi media, arsip pers, serta pernyataan strategis Pemerintah Republik Indonesia, di antaranya pada publikasi Sekretaris Presiden melalui *Facebook* pada tanggal 27 dan 30 Juni 2022, Keterangan Pers Menteri Luar Negeri melalui *YouTube* Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 dan 18 Maret 2022, dan Pernyataan Strategis Presiden RI dalam Konferensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN-AS pada 13 Mei 2022.

**Gambar 1. Publikasi Media Sekretaris Presiden (27 Juni 2022)**



Sumber: Sekretaris Presiden, 2022

**Gambar 2. Publikasi Media Sekretaris Presiden (30 Juni 2022)**



Sumber: Sekretaris Presiden, 2022

**Gambar 3. Publikasi Media Sekretaris Presiden (30 juni 2022)**



Sumber: Sekretaris Presiden, 2022

Pada tema informasi kedua, yakni *Aktivitas Diplomasi Indonesia yang Inklusif* terhadap pihak Rusia dan Ukraina, Indonesia mempertahankan citra negaranya yang masih memegang hubungan sahabat dengan kedua negara. Sebagaimana Indonesia memiliki posisi yang tidak memihak pada salah satu negara, melainkan pada resolusi menuju perdamaian. Indonesia mengedepankan dirinya sebagai pembawa perdamaian yang masih memperlakukan kedua negara dengan adil. Sejak mulanya konflik mengalami eskalasi, Pemerintah Indonesia selalu mengadvokasikan bagaimana dirinya melibatkan kedua negara dalam aksi perdamaian melalui berjalannya kontak diplomatik dengan kedua negara. Indonesia juga memiliki pendekatan kebahasaan khusus, di mana tidak digunakan istilah “aggressor” kepada negara Rusia untuk menghormati sudut pandang konflik dari kedua sisinya, selagi terus menggunakan istilah “Perang di Ukraina” untuk mengakui pusat tragedi konflik yang terjadi.

Dalam tema informasi kedua, ditemukan cerminan nilai perdamaian Indonesia dalam aktivitas advokasinya yang menghargai perbedaan pandangan kedua pihak, namun tetap inklusif dalam membuka dialog perdamaian dengan tidak menjatuhkan satu pihak, menunjukkan pegangannya pada nilai politik luar negeri Bebas Aktif dan Non-Blok. Selain itu, dengan memprioritaskan komunikasi, Indonesia menunjukkan nilai penting akan kepemimpinannya yang adil, diplomatik, dan berintegritas.

Beberapa contoh publikasi dan pernyataan dapat ditemukan dalam publikasi *Instagram* KBRI Kyiv pada 26 April 2022 dan KBRI Moskow pada 16 Juli 2022, Keterangan Pers Presiden RI pada 29 April 2022, serta Pernyataan Strategis Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri (*Foreign Ministers' Meeting*) G20, 8 Juli 2022.

**Gambar 4. Publikasi Media KBRI Kyiv, 26 April 2022**



Sumber: KBRI Kyiv, 2022

**Gambar 5. Publikasi Media KBRI Moskow, 16 Juli 2022**



Sumber: KBRI Moskow, 2022

Pada tema informasi ketiga, Indonesia tak lupa untuk terus menyampaikan *afirmasinya akan kenyataan tragedi perang di Ukraina dan dampaknya bagi dunia*. Kesadaran Indonesia terhadap situasi Internasional merupakan bagian dari proses penguatan Diplomasi Indonesia sebagaimana diharapkan dalam Prioritas politik luar negeri Indonesia tahun 2022. Fungsi afirmasi ini tentu untuk memperkuat alasan mengapa Indonesia perlu mengkampanyekan perdamaian dan mengapa seluruh negara dunia harus ikut berpartisipasi membela perdamaian.

Dengan memfokuskan substansi informasi pada golongan spesifik, seperti yang Indonesia lakukan dengan seringkali berbicara “atas nama negara berkembang”, Indonesia mampu membangun solidaritas kawasan untuk mendukung resolusi yang disampaikan. Dalam menyampaikan informasi tersebut, cerminan terhadap posisi negara dalam situasi global dan dampak yang dirasakan oleh Indonesia beserta kawasan sekitar menjadi penting untuk mampu meramu solusi yang tepat tuju, termasuk demi meningkatkan potensi diterimanya kampanye solusi yang dilakukan. Cerminan terhadap nilai perdamaian dunia Indonesia juga ditunjukkan melalui sikap simpatis dan mengembangkan aspek multilateral dalam penyelesaian krisis global, menunjukkan pribadi Pemimpin kawasan yang positif.

Beberapa contoh publikasi resmi Pemerintah dan Pernyataan Strategis dapat ditemukan dalam Publikasi Instagram Kementerian Luar Negeri pada 11 Maret dan 29 Juni 2022, Keterangan Pers Presiden pada 29 dan 30 Juni 2022, serta Pernyataan Strategis Duta Besar Indonesia untuk Rumania, M. Amhar Azeth, dalam pembukaan “Kegiatan Amal dan Pengenalan Budaya Indonesia” di Kedutaan Besar RI Bucharest, 29 Maret 2022.

Gambar 6. Publikasi Kementerian Luar Negeri, 11 Maret 2022



Sumber: Kementerian Luar Negeri RI, 2022

Gambar 7. Publikasi Kementerian Luar Negeri, 29 Juni 2022



Sumber: Kementerian Luar Negeri RI, 2022

Pada tema keempat, Indonesia menyampaikan *alternatif solusi perdamaian atas perang di Ukraina*. Penyampaian ini cukup sering dilakukan dan tentunya disesuaikan dengan *audiens* yang ingin dijangkau. Ketika berbicara dalam forum internasional dengan target *audiens* utama anggota forum, Indonesia cenderung menyampaikan solusi yang lebih konkret. Hal ini ditunjukkan dengan beragam pertemuan, seperti KTT ASEAN-AS (13 Mei 2022), KTT ASEAN-PBB (11 November 2022), dan pertemuan lainnya di mana Indonesia menyampaikan sarannya untuk melakukan reintegrasi produksi pangan Ukraina dan pangan serta pupuk Rusia agar tercipta upaya pemilihan rantai pasok pangan global. Indonesia juga secara langsung mengadvokasikan desakannya kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata, dan mendorong negara dunia untuk bertanggung jawab bersama menciptakan *enabling environment* agar perang dapat dihentikan dan perdamaian mampu terwujud.

Pada aspek paradigmatis, Indonesia juga mengadvokasikan pandangannya untuk terus menumbuhkan semangat kerja sama, kolektivitas, multilateralisme, *win-win engagement*, dan langkah realistik untuk memulai aksi, termasuk dengan mendukung *black sea grain initiative*. Refleksi nilai perdamaian Indonesia dalam kampanye solusi yang diadvokasikannya sangat terlihat jelas. Berbagai aspek seperti “perdamaian bagi segala bangsa” dan penghargaan terhadap hak kedaulatan ditunjukkan dalam tema informasi keempat ini, di mana Indonesia terus mengharapkan penyelesaian secara damai yang diwarnai dengan nilai kerja sama selalu diutarakan.

Beberapa publikasi resmi Pemerintah dan Pernyataan Strategis mengenai advokasi solusi perdamaian Indonesia dapat ditemukan dalam publikasi Instagram Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 2 dan 4 Juli 2022, Keterangan Menteri Luar Negeri pada 6 dan 10 Oktober 2022, serta Pernyataan Strategis Presiden RI dalam Pertemuan Pers KTT G20 pada 16 November 2022 (Nazar, Komunikasi Pribadi, 2023; Yahya, Komunikasi Pribadi, 2023).

Gambar 8. Publikasi Media Kementerian Luar Negeri, 2 Juli 2022



Sumber: Kementerian Luar Negeri RI, 2022

**Gambar 9. Publikasi Media Kementerian Luar Negeri, 4 Juli 2022**



Sumber: Kementerian Luar Negeri RI, 2022

Berakhir pada tema kelima, *Indonesia juga memasukkan agenda lain* yang tidak selalu mengenai Perang di Ukraina ketika mengadvokasikan nilai perdamaian. Berbagai permasalahan global beserta kepentingan nasional Indonesia juga turut menjadi pertimbangan nilai dan kebijakan yang diadvokasikan. Didukung dengan hasil wawancara Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, selain karena dampak permasalahan tersebut yang mampu berpengaruh terhadap Indonesia, disadari bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan dunia tidak hanya jatuh pada satu krisis saja dan harus diselesaikan secara berkelanjutan.

Indonesia pun juga harus memastikan diplomasi yang dilakukan mampu mendukung kebijakan domestiknya, sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu prinsip politik luar negeri yang dianut Indonesia. Beberapa isu yang turut diadvokasikan Indonesia bersama dengan advokasi diplomasi publik mengenai perdamaian Rusia dan Ukraina adalah isu rantai pasok pangan dunia, krisis pangan, keuangan, dan energi dunia, pemulihan ekonomi dunia pasca Pandemi Covid 19, serta krisis kemanusiaan dan perdamaian lain di Myanmar, Palestina, dan Afghanistan (Nazar, Komunikasi Pribadi, 2023; Yahya, Komunikasi Pribadi, 2023).

Penyampaian kepentingan lain yang disuarakan bersamaan dengan agenda advokasi diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian Rusia-Ukraina dapat ditemukan dalam publikasi Instagram KBRI Kyiv pada 27 dan 30 Juni 2022, Instagram KBRI Moskow pada 16 Juli 2022, Pernyataan Pers Sekretaris Presiden RI pada 26 dan 27 Juni 2022, dan Pidato Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto dalam *The 19th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club and Presentation of the Valdai Club Report “A World Without Superpowers”*, 24 Oktober 2022.

**Gambar 10. Publikasi Media KBRI Kyiv, 27 Juni 2022**



Sumber: KBRI Kyiv, 2022

**Gambar 11. Publikasi Media KBRI Kyiv, 30 Juni 2022**



Sumber: KBRI Kyiv, 2022

Pada akhirnya, kelima nilai tersebut menunjukkan kejelasan konstruksi informasi dalam advokasi diplomasi publik Indonesia. Tiap tema informasi tersebut kemudian memiliki cerminan nilai perdamaian yang diketahui bukan hanya mengenai nilai perdamaian dunia, namun nilai perdamaian yang menganut idealisme khas Indonesia. Refleksi ide tersebut juga memiliki akar baik pada Dasar Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, termasuk prinsip politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Perwakilan Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik, dimana cerminan tersebut menjadi ciri utama yang berusaha dikembangkan oleh Indonesia mempertimbangkan potensi kontribusinya yang terbatas pada cara-cara diplomasi tertentu (Nazar, Komunikasi Pribadi, 2023; Yahya, Komunikasi Pribadi, 2023).

#### **b. Aspek Pemilihan *Audiens***

Berlanjut pada analisis pemilihan *audiens* dalam advokasi diplomasi publik Indonesia, terdapat beberapa pihak yang menjadi tujuan kampanye nilai Indonesia. Pada bentuk advokasi melalui metode pengelolaan informasi (*informational works*) melalui aktivitas pertama, yakni publikasi media resmi pemerintahan, ditunjukkan bahwa target utama yang diharapkan adalah publik asing domestik dan internasional. Dengan jumlah publikasi yang didominasi dengan bahasa Indonesia, maka target yang paling pertama diharapkan menjadi *audiens* dalam jenis advokasi ini tentu pembicara bahasa Indonesia. Walaupun begitu, tentu publik asing yang mengharapkan otentisitas berita juga menjadi *audiens* tujuan dari bentuk advokasi ini.

Pada bentuk kedua pengelolaan informasi, yakni penyampaian pernyataan strategis oleh Pemerintah RI dalam forum internasional, *audiens* yang dituju akan sesuai dengan konsep forum yang dibuat. Dalam hal ini, jika *audiens* utama forum adalah negara anggota dan atau organisasi internasional, maka publik asing lainnya – negara non anggota, media massa yang meliput serta masyarakat yang menyaksikan hasil liputan melalui sumber arsip di jejaring internet – merupakan *audiens* sekunder dalam aktivitas advokasi tersebut.

Contoh advokasi yang dilakukan Indonesia pada bentuk tersebut adalah pemberian pernyataan strategis Menteri Luar Negeri dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri rangkaian G20, 8 Juli 2022. Di lain sisi, terdapat juga contoh forum internasional yang menjadikan publik asing sebagai *audiens* primer melalui aktivitas pernyataan strategis Duta Besar Indonesia untuk Rumania, M. Amhar Azeth, dalam program “Kegiatan Amal dan Pengenalan Budaya Indonesia”, di mana *audiens* program tersebut adalah publik asing di negara Rumania, termasuk para pengungsi.

Melalui metode terakhir, yakni hubungan pers kedutaan (*embassy press relations*), dapat dikatakan bahwa *audiens* utama yang dituju dalam bentuk advokasi ini adalah pemirsa langsung penyampaian pers, baik komunitas media, akademisi, dan masyarakat sipil, yang menghadiri forum pers secara langsung. Hal tersebut ditunjukkan melalui keterlibatan media massa domestik dan internasional dalam agenda siaran pers langsung (luring dan daring). Sama dengan bentuk komunikasi yang dilakukan melalui penyampaian pernyataan strategis dalam forum diplomatik, publikasi hasil pers (baik dalam bentuk transkrip Keterangan Pers resmi Pemerintah, dan rekaman audiovisual pertemuan pers luring dan daring) melalui media *YouTube* dan *Website* resmi pemerintahan menciptakan akses bagi publik yang tidak menghadiri forum, sebagai *audiens* sekunder.

Walaupun siaran pers didominasi dengan penggunaan bahasa Indonesia, beberapa Keterangan Pers resmi Pemerintah ditulis secara dua bahasa (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), dan interaksi pertemuan pers dengan media internasional mampu dilakukan dengan dua bahasa dalam situasi tertentu. Selain itu, pertimbangan penggunaan bahasa Indonesia dalam pertemuan, siaran dan penulisan pers mampu meningkatkan otentisitas data dan menjadikan informasi yang disiarkan lebih akurat dengan maksud peramuan informasi.

Pada akhirnya, melalui analisis pemilihan *audiens* dapat dikatakan jika tiap bentuk aktivitas advokasi dalam diplomasi publik memiliki tujuan *audiens* nya masing-masing. Pemilihan *audiens* tersebut dilakukan secara hati-hati pada berbagai aktivitas yang diinisiasi Indonesia. Walaupun kenyataannya tidak semua aktivitas memberikan wewenang bagi Indonesia untuk memilih *audiens*-nya, Indonesia selalu memiliki kekuatan untuk merangkai konstruksi kebijakan yang diinginkan dan menyesuaikan penyampaian pesan yang dipercaya demi memastikan informasi tepat tuju dengan *audiens* yang dihadapinya (Nazar, Komunikasi Pribadi, 2023; Yahya, Komunikasi Pribadi, 2023).

### **c. Aspek Pemilihan Penyampai Pesan**

Berlanjut pada aspek terakhir, yakni pemilihan penyampai pesan, keragaman data menunjukkan adanya berbagai penyampai pesan sesuai dengan konteks aktivitas yang dilakukan. Dalam bentuk aktivitas publikasi media, terdapat empat aktor berbeda yang bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan. Pada publikasi media sosial Facebook dan Instagram yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI, informasi advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina dirancang oleh Biro Pers, Media dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara RI.

Penyampai pesan berbeda pada media sosial *Facebook* dan *Instagram* Kementerian Luar Negeri yang dipegang oleh Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri. Pada media sosial *Facebook* dan *Instagram* yang dilakukan Kedutaan Besar RI di Kyiv dan Moskow, publikasi dilakukan oleh staff KBRI. Karena media sosial juga dapat menjadi wadah penyampaikan informasi sekunder, media sosial pemerintah juga telah digunakan untuk menyampaikan ulang pandangan Pemerintah berkaitan kepada publik asing.

Pada bentuk aktivitas penyampaian pernyataan strategis, ditemukan bahwa dari 12 bentuk pernyataan: 5 pernyataan diberikan oleh Joko Widodo, Presiden RI, 3 pernyataan diberikan oleh

Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI, 1 pernyataan diberikan oleh Fadli Zon, Perwakilan Indonesia untuk *Inter-Parliamentary Union*, 1 pernyataan diberikan oleh Armanatha Nasir, *Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations*, 1 pernyataan diberikan oleh Andi Widjajanto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), dan 1 pernyataan diberikan oleh M. Amhar Azeth, Duta Besar Indonesia untuk Rumania.

Beragam Peraturan Perundang-undangan menjadi landasan bagi kredibilitasnya sebagai penyampai informasi resmi Pemerintah Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Undang Undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.

Selain penilaian kredibilitas berdasarkan peraturan fungsi dan tugas melalui Undang-Undang, pemilihan aktor tertentu sebagai penyampai pesan strategis juga dilakukan berdasarkan pengetahuan akan situasi, kemampuan komunikasi yang dimiliki, dan kedekatannya dengan publik asing yang dituju. Beberapa contoh dari pertimbangan tersebut ditunjukkan oleh peran Andi Widjajanto yang didukung oleh Dr. Connie Rahakundini pada pernyataan dan partisipasinya dalam *the 19th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club and Presentation of the Valdai Club Report “A World Without Superpowers”*, 24 Oktober 2022, di mana kedua pihak tersebut memiliki tingkatan pengetahuan yang sesuai dengan negara Rusia, serta kedekatan khusus dengan jaringan pemerintahan Rusia sebagai perwakilan dari Indonesia.

Dalam bentuk aktivitas publikasi pers resmi pemerintahan, aktor yang bertanggung jawab kembali disesuaikan dengan media pers resmi yang bersangkutan. Publikasi artikel pers Sekretariat Presiden RI dilakukan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, sedangkan pada Penyiaran serta Publikasi Pers Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Direktorat Jendral Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri. Di sisi lain, terdapat pula penyiaran dan publikasi pers dalam bentuk Keterangan Pers dari pihak Pemerintah secara khusus. Pada bentuk tersebut, informasi akan secara langsung disampaikan oleh Presiden RI dan Menteri Luar Negeri (Nazar, Komunikasi Pribadi, 2023). Adapun ringkasan aspek pemilihan *audiens* dan pemilihan penyampai pesan advokasi dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3. Aspek “Pemilihan Audiens” dan “Penyampai Pesan” Advokasi**

Aktivitas Advokasi	Audiens yang Dituju	Penyampai Pesan Advokasi
<b>Publikasi media resmi Pemerintah RI</b>	Publik asing, domestik, dan internasional	Biro Pers, Media dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara RI, Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, dan Staff KBRI Kedutaan Besar RI di Kyiv dan Moskow.
<b>Penyampaian pernyataan strategis oleh Pemerintah RI</b>	<i>Audiens</i> primer: pihak yang menghadiri forum secara langsung. <i>Audiens</i> sekunder: publik asing dan	Pemerintah RI, di antaranya: Presiden RI, Menteri Luar Negeri RI, Perwakilan Indonesia untuk Inter-Parliamentary Union, <i>Permanent</i>

	domestik yang melihat hasil arsip pertemuan.	<i>Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations, Gubernur Lemhannas RI, dan Duta Besar Indonesia untuk Rumania.</i>
<b>Publikasi dan penyampaian pers oleh Pemerintah RI</b>	<p><i>Audiens</i> utama: pemirsa langsung penyampaian pers, baik komunitas media, akademisi, dan masyarakat sipil, yang menghadiri forum pers secara langsung.</p> <p><i>Audiens</i> sekunder: publik asing dan domestik yang melihat hasil arsip pertemuan pers.</p>	Presiden RI secara langsung atau melalui Biro Pers, Media dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara RI, Menteri Luar Negeri RI secara langsung atau melalui Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, dan Staff KBRI Kedutaan Besar RI di Kyiv dan Moskow.

Sumber: Penulis, 2023

Pada akhirnya, advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengenai nilai perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022 hanya dapat terwujud dengan menggabungkan tiap aspek tersebut dalam proses advokasinya. Hal ini dimulai dengan konstruksi ide yang tepat untuk membangun tujuan yang jelas dan spesifik, pertimbangan *audiens* yang mendalam agar informasi yang disampaikan tepat tuju, serta memastikan adanya penyampaian pesan yang dapat dipercaya dan kredibel untuk eksekusi yang maksimal dari advokasi diplomasi publik yang direncanakan.

### **Analisis Elemen Advokasi dalam Diplomasi Publik Indonesia pada Konteks Terkait**

#### **a. Jangka Waktu Konseptual Advokasi**

Melalui dimensi ini, ditemukan bahwa advokasi dalam diplomasi publik Indonesia memiliki jangka waktu konseptual yang singkat, bersifat responsif, dan dirangkai spesifik untuk merespon isu darurat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa advokasi dalam diplomasi publik Indonesia miliki kesesuaian dengan konsep Cull (2009), namun dengan tambahan bahwa Indonesia tetap mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan kepentingan nasional yang mengiringi proses advokasinya (Nazar, Komunikasi Pribadi, 2023; Yahya, Komunikasi Pribadi, 2023).

Melalui ketiga aktivitas utama yang dilakukan Indonesia dalam mengadvokasikan ide perdamaian, Indonesia secara langsung menunjukkan nilai dan gagasan kebijakannya akan perang di Ukraina baik dalam penyampaian Nilai, Posisi dan Kontribusinya dalam Konflik Rusia-Ukraina, informasi aktivitas diplomasinya yang inklusif terhadap pihak Rusia dan Ukraina, afirmasi yang diberikan akan tragedi Perang di Ukraina dan dampaknya bagi dunia, serta kampanye solusi perdamaian atas Perang di Ukraina. Penyampaian advokasi Indonesia dilakukan selama terus menerus pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen pada penyelesaian isu, sebagaimana isu Ukraina merupakan tragedi kompleks dengan dampak multidimensi yang terjadi dalam waktu yang lama.

Dengan tetap mengembangkan sifat responsif dan reaktif dalam informasi yang disampaikan, Indonesia juga berupaya untuk memastikan relevansi informasi agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan topik publikasi media, pers, dan pembuatan pernyataan strategis yang walaupun memiliki tujuan utama yang sama – perdamaian Rusia-Ukraina dengan menyebarluaskan nilai serta gagasan kebijakan Indonesia – dapat terjadi perbedaan tujuan kampanye jika isu yang ingin dibahas dalam advokasi berkembang (Nazar, Komunikasi Pribadi, 2023; Yahya, Komunikasi Pribadi, 2023).

**b. Laju Informasi Advokasi**

Pada dimensi kedua, hasil temuan menunjukkan kehadiran Pemerintah RI – baik melalui perwakilan dan instansi yang berwenang – sebagai pemilik tanggung jawab menyebarkan informasi yang berisi nilai dan gagasan kebijakan negara Indonesia kepada publik asing. Advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina pun berlangsung dari dalam ke luar atau bersifat *outward looking*.

Berdasarkan aktivitas advokasi terkait, perwakilan negara Indonesia, baik Presiden RI dan Menteri Luar Negeri RI, menjadi perwakilan utama yang didukung oleh instansi pemerintahannya (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, serta Perwakilan RI lainnya termasuk Duta Besar Indonesia). Informasi dari pihak tersebut kemudian disebarluaskan melalui tiga kanal aktivitas, yakni publikasi media sosial pemerintahan, penyampaian pernyataan strategis secara langsung di forum internasional, serta publikasi pers resmi (baik melalui siaran langsung maupun arsip digital).

Hasil wawancara dengan narasumber perwakilan Direktorat Informasi dan Diplomasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyatakan bahwa walaupun salah satu target diplomasi publik Indonesia merupakan publik asing, penyampaian advokasi juga berlaku sebagai bentuk diplomasi edukasi kepada masyarakat Indonesia di luar negeri, masyarakat Indonesia di dalam negeri, dan masyarakat asing di dalam negeri (Yahya, Komunikasi Pribadi, 2023; Cull, 2009).

**c. Penggunaan Infrastruktur Pemerintahan**

Mengenai dimensi ketiga advokasi dalam diplomasi publik, hasil temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadikan infrastruktur negara sebagai sumber dayanya dalam menyampaikan nilai dan gagasan kebijakan mengenai perdamaian pada konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022. Penggunaan infrastruktur ini ditunjukkan melalui analisis aktivitas advokasi pada instansi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara RI, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv dan Moskow.

Pada aktivitas pertama advokasi, ditemukan aktivitas advokasi melalui publikasi media pada infrastruktur digital pemerintahan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara RI, dan Kedutaan Besar Indonesia di Kyiv dan Moskow. Hasil menunjukkan bahwa pada konteks kampanye nilai dan gagasan kebijakan mengenai perdamaian Rusia-Ukraina, publikasi Kementerian Sekretariat Negara RI menunjukkan angka paling tinggi dengan jumlah 27 unggahan media sosial, di mana 14 darinya dilakukan melalui media Instagram dan 13 darinya dilakukan melalui media Facebook.

Pada urutan kedua, publikasi konten kampanye nilai dan gagasan kebijakan terkait paling banyak dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv dengan jumlah 13 unggahan media sosial, di mana 8 darinya dilakukan melalui media Instagram dan 5 darinya dilakukan melalui media Facebook. Publikasi terbanyak ketiga yang dilakukan oleh infrastruktur media Kementerian Luar Negeri RI dengan jumlah 6 unggahan media sosial, di mana 5 darinya dilakukan melalui media dan 1 darinya dilakukan melalui media Facebook. Publikasi dengan jumlah paling sedikit ditemukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow dengan jumlah publikasi sebanyak 2 unggahan, di mana 1 darinya dilakukan melalui media Instagram dan 1 unggahan dilakukan melalui media Facebook.

Pada aktivitas kedua, yakni penyampaian pernyataan strategis di forum internasional, advokasi dalam diplomasi publik Indonesia dilakukan dalam platform pertemuan internasional yang mempertemukan perwakilan negara di seluruh dunia. Bagi Indonesia, advokasi dalam diplomasi publik mengenai perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina dilakukan melalui perpanjangan tangan pemerintahan RI, seperti melalui Perwakilan Pemerintah Indonesia dengan

kewenangan mengelola kebijakan luar negeri (Presiden RI, Menteri Luar Negeri RI, dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI), Perwakilan Pemerintah Indonesia di negara lain (KBRI Moskow dan KBRI Kyiv), Perwakilan Pemerintah Indonesia untuk *Inter-Parliamentary Union*, dan Perwakilan Pemerintah Indonesia untuk PBB.

Pada aktivitas terakhir, yakni publikasi pers resmi pemerintahan, advokasi dilakukan pada dua infrastruktur Pemerintah RI, yakni pada Kementerian Luar Negeri RI dan Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI melalui arsip *website* (tertulis) dan *YouTube* (siaran audiovisual). Pada publikasi yang dilakukan melalui infrastruktur Kementerian Luar Negeri RI, publikasi pers resmi pemerintahan mulanya dilakukan melalui luring dan daring. Hasil pertemuan pers tersebut menjadi sumber bagi arsip pers resmi Kementerian Luar Negeri, di mana pada bentuk pers artikel akan diunggah di *Website* Kementerian Luar Negeri dan bentuk pers siaran akan diunggah di *YouTube* Kementerian Luar Negeri. Analisis yang dilakukan pada infrastruktur kedua, yakni Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, publikasi pers juga dilakukan secara luring dan daring, sebelum data pertemuan disimpan dalam arsip digital *Website* dan *Youtube*.

#### **d. Kredibilitas Berdasarkan Kedekatan dengan Pemerintahan**

Berkaitan dengan dimensi terakhir, hasil temuan menunjukkan tingginya peran Pemerintah RI sebagai komunikator nilai dan gagasan kebijakan mengenai perdamaian Indonesia pada Konflik Rusia-Ukraina. Hal tersebut menunjukkan kredibilitas yang tinggi dari informasi berdasarkan keterpercayaan sumber informasi advokasi. Temuan kemudian menunjukkan kehadiran berbagai aktor yang berpengaruh dalam melakukan kampanye nilai serta gagasan kebijakan mengenai perdamaian, yakni Presiden RI bersama dengan dukungan Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI, Menteri Luar Negeri beserta Kementerian Luar Negeri RI, serta perwakilan pemerintahan Indonesia lainnya seperti Kedutaan Besar Indonesia untuk Kyiv dan Moskow, Perwakilan Indonesia untuk *Inter-Parliamentary Union*, Perwakilan Indonesia untuk PBB, dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Dengan informasi advokasi yang dikelola secara terstruktur dalam lembaga nasional berwenang, maka efektivitas advokasi dalam diplomasi publik Indonesia meningkat bersamaan dengan tingginya kedekatannya dengan aktor pemerintahan. Lebih dari itu, dengan terpusatnya pengelolaan informasi, Pemerintah RI memiliki fungsi terhadap seluruh perancangan, publikasi, dan pengawasan terhadap informasi yang disebar untuk memastikan kebenaran serta menghindari tersebarnya berita palsu di media publik.

## **KESIMPULAN**

Advokasi merupakan salah satu metode diplomasi publik yang dilakukan Indonesia untuk mengkomunikasikan nilai perdamaian pada Konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022. Advokasi dalam diplomasi publik tersebut dilakukan melalui tiga bentuk aktivitas, yakni publikasi sosial media resmi Pemerintah RI, penyampaian pernyataan strategis melalui jejaring dan forum diplomatik Indonesia, serta melalui penyampaian dan publikasi pers resmi Pemerintah RI.

Berkaitan dengan ketiga aspek advokasi, diketahui bahwa pertimbangan akan tujuan, *audiens*, dan menyampaikan pesan dilakukan secara bersamaan dan saling melengkapi. Analisis temuan menunjukkan adanya tujuan yang jelas dari advokasi yang dilakukan Indonesia, melalui lima tema informasi utama, yakni: (1) pernyataan akan nilai perdamaian Indonesia sesuai dengan dasar negara dan petunjuk pelaksanaan politik luar negeri, posisi negaranya yang tidak memihak selain pada perdamaian dunia, serta kontribusinya dalam bantuan kemanusiaan, (2) aktivitas diplomasi Indonesia yang inklusif dan berupaya menjaga hubungan baik dengan kedua negara, (3) pemberian afirmasi atas tragedi yang terjadi dan pengakuan atas dampaknya bagi dunia, (4) penyuaran kampanye solusi perang, seperti

melalui pendukungan *black sea grain initiative* dan semangat multilateralisme, serta (5) pemasukkan agenda non-Konflik Rusia-Ukraina seperti kepentingan negaranya melalui kampanye isu pangan global.

Proses advokasi yang dilakukan Indonesia berlangsung dengan mempertimbangkan *audiens* dengan hati-hati dan menyampaikan pesan yang dapat dipercaya. Berdasarkan *audiens* yang dituju, aktivitas advokasi melalui publikasi media sosial ditujukan kepada publik asing secara langsung dan luas. Di sisi lain, aktivitas komunikasi yang dilakukan melalui penyampaian dan publikasi pers dan pernyataan strategis pada forum internasional cenderung diutamakan pada publik yang menghadiri forum (baik perwakilan negara, perwakilan Organisasi Internasional, dan perwakilan media massa). Publikasi pada arsip publik pun menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk menjangkau publik lain yang tidak menghadiri forum secara langsung.

Adapun pada pemilihan penyampaian pesan, advokasi dilakukan melalui Pemerintah RI yang kredibilitasnya mampu ditunjukkan melalui dua hal, yakni berdasarkan Undang-Undang yang mengatur fungsi aktor tersebut sebagai pelaku advokasi dalam diplomasi publik Indonesia (seperti UU No. 37 Tahun 1999) dan berdasarkan pengetahuan akan situasi, kemampuan komunikasi yang dimiliki, dan kedekatannya dengan publik asing yang dituju.

Berdasarkan tinjauan karakteristik, proses advokasi yang dilakukan Indonesia juga telah menunjukkan jangka waktu proses yang singkat, laju informasi advokasi yang bergerak dari dalam ke luar (*outward-looking*) di mana Pemerintah RI menjadi penyampaikan advokasi dan publik asing menjadi penerima informasi advokasi, penggunaan infrastruktur pemerintahan dalam advokasi yang ditunjukkan dengan pemanfaatan media digital dan sumber daya pemerintahan, serta kredibilitas informasi yang tinggi berdasarkan keterpercayaan sumber informasi advokasi, yakni oleh Pemerintah RI.

## DAFTAR PUSTAKA

Abualkanam, A. (2023). Russian-Ukrainian Crisis: Causes and Impacts of the War. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 58(2), 563–573. <https://doi.org/10.35471/issn.0258-2724.58.2.52>.

Agung. (2018). Diplomasi Publik Indonesia ke Australia melalui Wonderful Indonesia. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/37268>.

Agustini, et al. (2021). Evaluasi Diplomasi Publik Indonesia pada Asian Games 2018. Sriwijaya University Institutional Repository. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/76961>.

Amrozhi et al. (2022). Peta Perkembangan E-Government di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi. Vol 14(1). <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>.

Arjanto, D. (2022). Krisis Pangan, 3 Negara yang Paling Menderita Efek Perang Rusia Ukraina. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/1605084/krisis-pangan-3-negara-yang-paling-menderita-efek-perang-rusia-ukraina>.

Azmi. (2023). Kebijakan Luar Negeri Indonesia (Kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono). *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences*. Vol 2(1).

Bank Indonesia. (2022). Perkembangan Ekonomi Global di Tengah Berbagai Tantangan. Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (PEKKI) 2022. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/PEKKI-2022.aspx>.

Cull, N. J. (2009). *Public Diplomacy : Lessons from the past* (p. 12). Figueroa Press.

Cull, N. J. (2012). *The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989-2001*. Palgrave Macmillan.

Cull, N. J. (2022). Public Diplomacy and the Road to Reputational Security: Analogue Lessons from US History for a Digital Age. AIDDATA. A Research Lab at William and Mary. [https://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/gf1\\_03\\_Public\\_Diplomacy\\_and\\_the\\_Road\\_to\\_Reputational\\_Security.pdf](https://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/gf1_03_Public_Diplomacy_and_the_Road_to_Reputational_Security.pdf).

Darmosumarto, S. (2013). Indonesia and the Asia-Pacific: Opportunities and Challenges for Middle Power Diplomacy. German Marshall Fund of the United States. <http://www.jstor.org/stable/resrep18681>.

Djalal, D. P. (2022). Indonesia's Public Diplomacy: The Growing Role of Optics in Foreign Policy. *Winning Hearts and Minds*, 38–46. [https://doi.org/10.1142/9789811250446\\_0005](https://doi.org/10.1142/9789811250446_0005).

Gregory, B. (2011). American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(3-4), 351-372. <https://doi.org/10.1163/187119111X583941>.

Henrikson, K A. (2022). *The Trauma of Territorial Break-up: The Russia-Ukraine Conflict and Its International Management—Geopolitical Strategy and Diplomatic Therapy*. Geopolítica(s). Vol. 13(1) hal. 15-40. <https://dx.doi.org/10.5209/geop.81880>.

Huddleston, et al. (2022). *Handbook of Research Methods in International Relations*. Edward Elgar Publishing Limited. ProQuest Ebook Central. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bham/detail.action?docID=7080305>.

Huijgh, E. (2016). The Public Diplomacy of Emerging Powers Part 2: The Case of Indonesia. USC Centre of Public Diplomacy at the Annenberg School. CDC Perspectives on Public Diplomacy Paper 4 2016. Los Angeles. ISBN-13: 978-0-18-220592-9.

Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 154. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>.

Junaedi. (2022). The Impact of the Russia-Ukraine War on Grace Indonesia-Russia Diplomacy Relations. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i1.137>

Kementerian Luar Negeri RI. (2023a). Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2022. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Kementerian Luar Negeri RI. (2023b). Laporan Kinerja Direktorat Media dan Informasi Republik Indonesia tahun 2022. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Khatrunada & Alam. (2019). Diplomasi Budaya Indonesia melalui International Gamelan Festival 2018 di Solo. *Padjadjaran Journal of International Relations*. Vol 1(2). 2019. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.26125>.

Kuzio, T. (2022). Why Russia Invaded Ukraine. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, 21, 40–51. <https://www.jstor.org/stable/48686695>.

Lamb, C., James, P., & Komesaroff, P. (2023). Why peace negotiations haven't gained any traction in the Ukraine war – and how the stalemate could be broken. The Conversation. <https://theconversation.com/why-peace-negotiations-havent-gained-any-traction-in-the-ukraine-war-and-how-the-stalemate-could-be-broken-200913>.

Laras, N. S. (2021). TVRI World, Mimpi Stasiun TV Publik Berkelas Dunia. [Www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id). <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/01/21/tvri-world-mimpi-stasiun-tv-publik-berkelas-dunia>.

Lusiana, et al. (2019). Bali Democracy Student Conference: Promosi Demokrasi Melalui People to People Dialogue dalam Forum antar Pemerintah. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol 15(2). 2019. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/5104/3393>.

Mankoff, J. (2022). *Russia's War in Ukraine: Identity, History, and Conflict*. Center for Strategic and International Studies (CSIS). <http://www.jstor.org/stable/resrep40567>.

MD, R A et al. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol. 16(2) hal. 259-276. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.4422.259-276>.

Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan.

Mudore, S B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Studi Timur Tengah (CMES)*. Vol 12(2) hal. 170-181. DOI: <https://doi.org/10.20961/cmes.12.2.37891>. <https://jurnal.uns.ac.id/cmes/article/view/37891>.

Mukrimin. (2013). *The Influence of Mass Media in Political Change in Indonesia*. Politika: Jurnal Ilmu Politik Undip, vol. 3, no. 2, 2012, pp. 57-67.

Nazar, J. S. (2023). [Wawancara dengan Jurman Saputra Nazar, Staf Fungsi Sosial Budaya, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri]. Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik. Kementerian Luar Negeri RI.

Pamment, J. (2013). *New Public Diplomacy in the 21st Century*. Routledge.

Ross, C. (2003). *Pillars of Public Diplomacy: Grappling with International Public Opinion*. Harvard International Review, 25(2), 22. Social Science Premium Collection.

Salmaagista, et al. (2022). Strategi Diplomasi Publik Indonesia dalam Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 di Era Covid-19. Sriwijaya University Institutional Repository. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/86123>.

Sari, et al. (2018). Indonesian Government on Rohingya Refugees. *Andalas Journal of International Studies*. Vol 7(1). 2018. <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/76/70>.

Sen, K., & Hill, D. T. (2007). *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing.

Snow, N & Cull. (2020). *Routledge Handbook of Public Diplomacy* (2nd ed.). Routledge.

Sundari, et al. (2021). Upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. *Jurnal Niara*. Vol 14(1). 2021. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/6011>.

Suratiningsih, et al. (2020). Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia dalam isu Palestina pada tahun 2014 – 2020. *Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 25(1). 2020. <http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v25i1.2602>.

Tiffany & Azmi. (2020). Diplomasi Publik Indonesia melalui Penyelenggaraan Asian Games 2018. Padjadjaran *Journal of International Relations*. Vol 1(3). 2020. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26193>.

United Nations. (2022). *Secretary-General's Press Encounter on the War in Ukraine*. United Nations. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2022-03-28/secretary-general%E2%80%99s-press-encounter-%E2%80%93-the-war-ukraine>

Waller. (2007). *The Public Diplomacy Reader*. Institute Of World Politics Press.

Wardhani, P. (2021). Bali Democracy Forum 2008-2020 sebagai diplomasi publik Indonesia. UPN "Veteran" Jawa Timur. <http://repository.upnjatim.ac.id/4738/2/Bab%201.pdf>.

Wibowo, et al. (2021). *2018 Asian Games as Implementation of Indonesian Public Diplomacy*. Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi. 2021. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5192>.

Widiatmaja & Albab. (2019). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional. *Politica*. Vol 10(1)

Wuryandari. (2022). Politik Luar Negeri Era Reformasi: Kebangkitan Indonesia Sebagai Negara Kekuatan Menengah dalam Percaturan Regional dan Global. Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Yahya, Y. (2023). Wawancara dengan Yasyfi Yahya, Staf Fungsi Sosial Budaya, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri]. Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik. Kementerian Luar Negeri RI.

Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press.

## BIOGRAFI

**Nayottama Syauqilhaq Nurdin** alumni program studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran yang tertarik pada kajian Diplomasi, Perdamaian, dan Media Komunikasi Global.

**Chandra Purnama**, pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran dengan fokus studi Diplomasi Publik/Budaya, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, dan Media Komunikasi Global.

**Kiagus Zaenal Mubarok**, pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran dengan fokus studi Migrasi Internasional, Studi-studi ASEAN, dan Studi Global.